

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN
ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diusulkan oleh

BESSE ERNIANTI

Nomor Stambuk : 10561 04144 11



**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pembinaan
Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota
Makassar
Nama Mahasiswa : Besse Ernianti
Nomor Stambuk : 10561 04144 11
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



DR.H. Muhlis Madani, M.,Si

Pembimbing II



Nasrul Haq S.Sos MPA

Mengetahui:

Dekan



Fisipol Unismuh Makassar
Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Fisipol Unismuh Makassar



Nasrulhaq S.Sos MPA

PENERMAAN TIM

Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji skripsi Dekan Fisipol Unversitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0012/FSP/A.4-VIII/II/40/2019 sebaga salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Kamis Tanggal 28 Februari 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. DR.H. Muhlis Madani, M.Si
2. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
3. DR. H. Muhammad Isa Ansari, M.Si
4. Nasrul Haq, S.Sos, M.PA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Besse Ermianti
Nomor Stambuk : 10561 04144 11
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini dari penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, juni 2019

Yang Menyatakan,


Besse Ermianti

ABSTRAK

BESSE ERNIANTI, (2019). *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar*(dibimbing oleh Muhlis Madani dan Nasrul haq).

Anak jalanan adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4 sampai 8 jam perhari. Anak yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi, dan anak yang berkeliaran di tempat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan informan sebanyak 8 (delapan) orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan pada Dinas Sosial Kota Makassar sudah jelas dan terarah, hal ini dapat dilihat dari organisasi, intepretasi, dan aplikasi. 2) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Sejauh ini program pembinaan tersebut berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala-kendala yang dialami oleh para pembina maupun anak jalanan itu sendiri.

Keyword: Implementasi Kebijakan, Pembinaan, Anak Jalanan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar”. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak dan akhirnya dapat dirampungkan sekalipun dalam bentuk sederhana. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan.
2. Bapak Nasrulhaq S.Sos, MPA selaku pembimbing II dan selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah rela meluangkan waktu dan tak kenal lelah membimbing dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik. S.Sos.,M.Si selaku Dekan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh dosen dan staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah yang telah mengajar penulis dan telah membantu penulis hingga penulis sudah sampai kejenjang ini.
5. Angkatan 011 Administrasi Negara khususnya kelas E yang telah setia menemani penulis saat suka maupun duka.

6. Kepala Dinas Sosial beserta staf yang telah memberikan data dan telah rela meluangkan waktu untuk wawancara.
7. Dan semua pihak yang telah membantu, yang penulis tak sempat sebutkan satu persatu.

Terakhir penulis persembahkan karya ini kepada kedua orang tua, ayahanda Baso Mappasessu dan ibunda Besse Tenri Angke yang telah merawat, memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan gelar nanti.



Makassar, juni 2019

Yang Menyatakan,


Besse Ernianti

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i	
Halaman Persetujuan	ii	
Halaman penerimaan tim	iii	
Halaman Pernyataan Keaslian karya Ilmiah	iii	
Abstrak	iv	
Kata Pengantar	v	
Daftar Isi.....	vi	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah.....	1	
B. Rumusan Masalah	4	
C. Tujuan Penelitian.....	4	
D. Kegunaan Penelitian.....	5	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Kebijakan publik	6	
B. Implementasi kebijakan	11	
C. Pembinaan	18	
D. Anak jalanan	21	
E. Kerangka pikir.....	26	
F. Fokus Penelitian	27	
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27	
BAB III METODE PENELITIAN		
A. Waktu, dan lokasi penelitian	28	
B. Jenis dan tipe penelitian	28	
C. Sumber Data	30	
D. Informan Penelitian	30	
E. Teknik Pengumpulan Data	31	
F. Teknik Analisis Data	34	
G. Keabsahan Data	34	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		35
A. Deskripsi Obyek Penelitian	35	

B. Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar.....	49
C. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pembinaan anak jalanan di dinas sosial kota makassar	59
BAB V PENUTUP	66
A. KESIMPULAN	66
B. SARAN-SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kesejahteraan anak suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun lingkungan sosialnya. Anak merupakan seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah dijalanan. Anak jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4-8 jam perhari.

Permasalahan tentang anak jalanan di Indonesia memang bukanlah permasalahan yang baru. Melihat kondisi tersebut seharusnya ada penanganan yang lebih spesifik tentang anak jalanan. Sehingga dikemudian hari bangsa ini terlepas dari realitas sosial bernama anak jalanan. Sehingga kemudian dirumuskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Negara yang dalam arti pemerintah berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin dan anak terlantar. Anak terlantar yang dimaksudkan adalah anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan baik fisik, mental, spritual, maupun sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah yang seharusnya mengayomi rakyatnya kini telah melenceng dari tugasnya. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya masalah sosial yang belum terpecahkan, seperti masalah anak jalanan. Keberadaan anak di jalanan dapat dikarenakan beberapa hal. Salah satunya karena tidak terpenuhinya hak-hak mereka selama berada di ranah domestik, juga karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Alasan itulah yang menjadi penyebab anak turun ke jalan. Alasan lain anak jalanan harus berada di jalanan karena keadaan ekonomi, keluarga yang menunjukkan kegagalan dalam pemenuhan hak asuh yang ideal untuk keadaan anak jalanan.

Fenomena anak jalanan inilah yang perlu mendapatkan banyak perhatian dari pemerintah saat ini. Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak terlantar. Pada umumnya anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya. Penanganan anak jalanan dan pemenuhan hak-

hak anak oleh pemerintah belum melekat dalam diri anak jalanan. Sementara razia-razia yang dilakukan oleh petugas secara nyata melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Kebijakan yang ada untuk menangani anak jalanan tidak terjadi diskriminasi dan marginalisasi anak jalanan yang semakin menjauhkan mereka dari hak-hak yang semestinya mereka peroleh.

Perumusan kebijakan baik itu menyangkut program ataupun kegiatan-kegiatan, selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Begitupun seharusnya bagi perumusan kebijakan terhadap anak jalanan di Kota Makassar. Sehingga pemerintah Kota Makassar merumuskan pula sebuah Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar, sebagai acuan kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar saat ini. Betapa pun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti.

Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama yakni, (a) organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit, serta metode untuk

menunjang agar program berjalan, (b) interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan (c) aplikasi, (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar karena merupakan sebuah fenomena sosial yang sampai hari ini masih terus menjadi perbincangan tanpa menemukan solusi dalam hal pembinaan anak jalanan yang semestinya dan selayaknya diterima oleh mereka.

Mengakumulasi latar belakang masalah yang terjadi diatas dari observasi awal maka sangat penting mengangkat tema penelitian *“Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditetapkan suatu masalah pokok, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar ?
2. Apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti tersebut, maka tujuan yang diharapkan akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Adapun kegunaan teoritis penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan dalam rangka ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- b. Sebagai sumbangsi pemikiran dan bahan refensi kepada semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai pembinaan anak jalanan khususnya di Kota Makassar.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi dan masukan bagi pihak pengelola di Dinas Sosial Kota Makassar.
- b. Hasil penelitian diharapkan menjadi pertimbangan bagi pengelola dan pembina dalam mengambil kebijakan tentang kemajuan pembinaan dan pelayanan di Dinas Sosial Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Pegertian kebijakan menurut beberapa para ahli antara lain sebagai berikut :

1. Carl J. Friedrich (Soenarko, 2003: 42) mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan

mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu.

2. Chandier & Piano (dalam Tangkilisan, 2003: 1) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kenyataannya, kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik.
3. Woll (dalam Tangkilisan, 2003: 2) kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut yaitu:
 - a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat,
 - b. Adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat,
 - c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

4. Arenawati (2013: 82) beberapa pengertian dari kebijakan yaitu :

- a. Mustoprdidjaja, Kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta prilaku negara pada umumnya tersebut kita dapat menarik kesimpulan, bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah akan dituangkan dalam peraturan daerah yang mendapat persetujuan DPRD.
- b. Anderson, Kebijakan yaitu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang untuk memecahkan suatu masalah.
- c. Thomas R. Dye, Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dari tiga definisi tersebut dapatlah dijelaskan bahwa kebijakan adalah tindakan atau kegiatan pemerintah daerah untuk melakukan suatu atau melakukan apapun dalam memecahkan suatu masalah.

Kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Nurcholis, 2007, 265-267) :

1. Kebijakan adalah tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat.
2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
3. Kebijakan harus dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam penyelesaian masalah.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan, ataupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan kegiatan yang dijalankan. Kebijakan publik mencakup hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan, dan pelaksanaan yang dibuat oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, birokrasi pemerintahan, aparat penegak hukum, dan badan-badan pembuat keputusan publik. Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki manfaat dan tujuan yang mulia dalam masyarakat.

James E. Arderson dalam Sahya Anggara dengan bukunya “Kebijakan Publik” (2014: 55) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut :

1. *Substantive and Procedural Policies*
 - a. *Substantive policy* adalah kebijakan ditinjau dari substansi masalah yang dihadapi pemerintah. Contoh : kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi.
 - b. *Procedural policy* adalah kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*).
2. *Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies*
 - a. *Distributive policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. Contoh, kebijakan tentang *tax holiday*.
 - b. *Redistributive policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Contoh, kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

c. *Regulatory policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan/tindakan. Contoh, kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

3. *Material Policy*

Material policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contoh, kebijakan pembuatan rumah sederhana.

4. *Public Goods and Private Goods Policy*

a. *Public goods policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Contoh, kebijakan tentang perlindungan keamanan dan penyediaan jalan umum.

b. *Private goods policy* adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu (perseorangan) di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Contoh, tempat hiburan, hotel.

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang

bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan ini dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari kata "*implementation*" yang berarti suatu pelaksanaan atau penyelenggaraan. Jadi arti dari implementasi disini adalah mengaplikasikan sebuah teori ke dalam realita, sehingga akan menghasilkan manfaat dari teori tersebut serta dapat mengembangkannya menjadi lebih sempurna. Jadi, implementasi merupakan aplikasi atau penerapan yang berasal dari teori, berangkat dari teori kemudian diterapkan pada lapangan, sehingga dari permasalahan yang ada akan menghasilkan sebuah kesimpulan realistik.

Daniel. A. Masmanian dan paul A. Sabatier dalam (Solichin Abdul Wahab, 2008) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian imflementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengaministrasikannya maupun untuk menimbulkan akiba atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk

mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus (dalam Tangkilisan, 2003: 17).

Implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu sebagai berikut : 1) *Who is involved in policy implementation*, (yang berarti siapa yang mengimplementasikan kebijakan) 2) *The nature of the administrative process* (yang berarti hakekat dari proses administrasi), 3) *Compliance with policy content* (yang berarti kepatuhan kepada kebijakan), 4) *Impact* (yang berarti efek dan dampak dari implementasi kebijakan), Anderson (dalam Fadillah Putra, 2003: 82).

Sedangkan Implementasi kebijakan menurut guru besar ilmu administrasi UNPAD, Prof. H. Tachjan dalam bukunya Implementasi Kebijakan Publik menyimpulkan bahwa, “Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi Kebijakan mengandung logika yang top-

down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro” (2006: 25).

Beberapa teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa pakar.

1. Van Meter dan Van Horn (dalam Agostino, 2006: 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
2. Charles Jones (dalam Nuryanti, 2013) mengemukakan implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoprasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas yakni a) organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, b) interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, c) aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan - kegiatan rutin yang meliputi barang dan jasa.
3. Masmanian dan Sabatier (2006) mengklasifikasi proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yaitu :
 - a. Variabel independen, mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknik pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki,

- b. Variabel intervening, variabel kemampuan kebijakan untuk mensruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsisten dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierakis diantara lembaga pelaksana aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan indikator kondisi sosial, ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstitu, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana,
- c. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat kebijakan.

Tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah (Tangkilisan, 2003: 9).

Dalam penulisan ini teori yang dipakai adalah teori Charles Jones karena teori Charles Jones ini dianggap tepat mewakili dari pada teori yang lain mengenai implementasi itu terbukti dengan menawarkan tiga aktivitas yaitu yang pertama adalah adanya sebuah organisasi yang menjadi wadah dalam pelaksanaan program kerja dari sebuah rencana, kedua adalah interpretasi dengan maksud untuk mengarahkan rencana menjadi program kerja untuk dapat diterima dan dilaksanakan, ketiga dalam teori Charles Jones menawarkan sebagai pelengkap agar implementasi bisa terlaksana dengan baik yaitu adalah adanya aplikasi dari sebuah rencana yang dirumuskan oleh sebuah organisasi sebagai bentuk penerapan kegiatan dengan pelaksanaan rutin yang meliputi barang dan jasa.

Teori Charles Jones dalam penelitian ini mengenai implementasi kebijakan pemerintah terkait humanisasi anak jalanan di dinas sosial Kota Makassar dengan merumuskan sebuah rumusan masalah antara lain, bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terkait humanisasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar dan apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah terkait humanisasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar. Maka untuk melihat terlaksaksananya bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dan apa yang mempengaruhi implementasi dalam humanisasi anak jalanan, maka harus dilihat dari ketiga indikator tersebut diatas yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan penerjemahan pernyataan kebijakan (*policy statement*) kedalam aksi kebijakan (*policy action*). Dalam Aktifitas implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakan tersebut.

Menurut Meter dan Horn (Subarsono, 2005) terdapat enam pokok yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yakni :

a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan menurut kedua pakar ini harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen pelaksana.

b. Sumber daya

Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*).

c. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain agar sasaran kebijakan atau program tercapai.

d. Karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi

Norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan.

e. Kondisi sosial politik dan ekonomi.

Mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

f. Disposisi implementor

Mencakup tiga hal yang penting yaitu: 1) Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan; 2) Kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan; dan 3) Intensitas disposisi implementor.

Edward III (Subarsono, 2005) lebih lanjut mengemukakan beberapa premis untuk keperluan studi implementasi kebijakan prakondisi-prakondisi apakah yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kemudian diidentifikasi faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja dari implementasi. Faktor-faktor tersebut meliputi

empat variabel, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut tidak hanya secara langsung mempengaruhi implementasi, akan tetapi juga tidak secara langsung masing-masing faktor berpengaruh terhadap faktor lainnya.

C. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an. Istilah pembinaan atau berarti “pendidikan” yang merupakan pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa. Selanjutnya pembinaan atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Pada umumnya pembinaan terjadi melalui proses melepaskan hal-hal yang bersifat menghambat, dan mempelajari pengetahuan dengan kecakapan baru yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kerja yang lebih baik. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal. Dalam definisi tersebut secara implicit mengandung suatu interpretasi bahwa pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Kamus lengkap bahasa Indonesia (Badudu, 2002: 316) bahwa “pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara

berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) baik terhadap yang sudah ada (yang sudah dimiliki). Sedangkan Menurut Yurudik Yahya definisi atau pengertian pembinaan adalah “suatu bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa kepada anak yang perlu dewasa agar menjadi dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang kepribadian yang dimaksud mencapai aspek cipta, rasa, dan karsa.

Upaya pembinaan terhadap anak jalanan bukannya tidak pernah dilakukan. Sebagai contoh yang pernah terjadi di Pemda DKI Jakarta, sejak tahun 1998 telah mencanangkan program rumah singgah. Dimana bagi mereka disediakan rumah penampungan dan pendidikan. Akan tetapi, pendekatan yang cenderung represif dan tidak integrative, ditunjang dengan watak dasar anak jalanan yang tidak efektif. Sehingga mendorong anak jalanan tidak betah tinggal di rumah singgah. Selain pemerintah, beberapa LSM juga concern pada masalah ini. Kebanyakan bergerak di bidang pendidikan alternatif bagi anak jalanan. Kendati demikian, dibanding jumlah anak jalanan yang terus meningkat, daya serap LSM yang sangat terbatas sungguh tidak memadai. Belum lagi munculnya indikasi “komersialisasi” anak jalanan oleh beberapa LSM yang kurang bertanggungjawab dan hanya berorientasi pada profit semata.

Menurut Mathis (2002: 112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sedangkan menurut Ivancevich (2008: 46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Komponen-komponen pembinaan yang dijelaskan oleh Mangkunegara (2005: 76) terdiri dari :

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat dikur,
2. Para pembina yang profesional,
3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai,
4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Untuk menghindari kepentingan individu dengan kepentingan organisasi, maka diperlukan pembinaaan yang bermuatan suatu tugas yakni meningkatkan disiplin dan motivasi yang disebut dengan mendirikan sehingga menjadi suatu kebutuhan yang akhirnya memelihara atas apa yang didapat dengan melakukan berbagai perbaikan ke hal yang jauh lebih baik. Pemerintah nampaknya harus bekerja lebih keras dalam rangka melakukan pembinaan

anak jalanan, mengingat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya sesungguhnya mereka yang hidup terlantar (termasuk anak jalanan) juga harus menjadi perhatian negara. Ironisnya pemerintah seolah angkat tangan dalam menangani anak jalanan. Malah terkadang pemerintah melakukan razia baik untuk gepeng (gelandangan dan pengemis) ataupun anak jalanan. Padahal sebenarnya hal itu bukanlah solusi, karena akar dari permasalahan anak jalanan itu sendiri adalah kemiskinan. Jadi kalau ingin tidak ada anak jalanan ataupun gepeng pemerintah harusnya memikirkan cara mengentaskan mereka dari kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan adalah hal yang sulit, alternatif lain dengan cara meningkatkan pendidikan pada anak jalanan, karena mereka juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain.

D. Anak Jalanan

Anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika selatan tepatnya di Brazilia, dengan nama Meninos de Ruas untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga. Semua anak sebenarnya memiliki hak penghidupan yang layak tidak terkecuali anak jalanan. Namun ternyata realita berbicara lain, mayoritas dan bisa dikatakan semua anak jalanan terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan. Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Secara khusus anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktifitas lain.

Fenomena masalah anak jalanan merupakan isu global yang telah mencapai titik mengkhawatirkan. Situasi anak jalan di Indonesia cukup memprihatinkan karena sampai saat ini masalah-masalah anak khususnya pada anak-anak yang berada di jalanan belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Jumlah anak yang tinggal di jalanan terus menerus meningkat dan pemerintah pun tidak mempunyai data anak yang tinggal di jalanan.

Pengertian anak jalanan sesuai dalam (Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Ketentuan Umum Pasal 1) adalah anak yang beraktifitas di jalanan antara 4-8 jam perhari. Anak yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi, dan anak yang berkeliaran di tempat umum.

Menurut penelitian Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya (BKSN, 2002: 2-4), anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori :

1. Anak jalanan yang hiup di jalanan, dengan kriteria :
 - a. Putus hubungan atau lama tidak lama ketemu dengan orang tuanya.
 - b. 8-10 jam berada di jalanan unyuk “bekerja” (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang dan tidur.
 - c. Tidak lagi sekolah.
 - d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.
2. Anak jalanan yang bekerja, dengan kriteria :
 - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.

- b. 8-16 jam berada di jalanan.
 - c. Mengontrak kamar sendiri bersama teman, ikut orang tua/saudara umumnya didaerah kumuh.
 - d. Tidak lagi sekolah.
 - e. Pekerjaan : penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu.
 - f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria :
- a. Bertemu teratur setiap hari atau tinggal dan tidur dengan keluarganya.
 - b. 4-5 jam bekerja di jalanan.
 - c. Masih bersekolah.
 - d. Pekerjaan : penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll.
 - e. Usia rata-rata di bawah 14 tahun.
4. Anak jalanan berusia diatas 16 tahun, dengan kriteria :
- a. Tidak lagi berhubungan atau berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya.
 - b. 8-24 jam bekerja di jalanan.
 - c. Tidur di jalanan atau di rumah orang tua.
 - d. Sudah tamat SD atau SLTP, tapi sudah tidak bersekolah lagi.
 - e. Pekerjaan : calo, mencuci bus, menyemir, dan lain-lain.

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari

nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya (Kemosos RI, 2006). Anak jalanan sering kita dengar dalam kehidupan yang sangat menyedihkan ini.

Kehidupan anak jalanan biasanya paling identik dengan jalanan. Tetapi, sekarang ini di jalan-jalan raya, terminal, stasiun, bahkan tempat-tempat wisata, tempat-tempat ibadah selalu kita lihat mereka disana. Mereka mengamen, meminta-minta, bahkan mencopet dompet-dompet orang yang bukan hak milik mereka.

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.

Putranto (dalam Agustin, 2002) dengan studi kualitatifnya mendefinisikan anak jalanan sebagai anak berusia 6 sampai 18 tahun yang tidak bersekolah lagi dan tidak tinggal bersama orang tua mereka, dan bekerja seharian untuk memperoleh penghasilan di jalanan, persimpangan dan tempat-tempat umum. Sedangkan dalam buku "Intervensi Psikososial" (Depsos, 2001: 20), anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

Fenomena anak jalanan bukan hanya merupakan monopoli negara-negara berkembang, tetapi di negara-negara maju juga banyak bermunculan fenomena tersebut. Dalam istilah sosiologi, gejala tersebut sering dinamakan dengan *deviant behavior* atau perilaku yang menyimpang dari tataran

masyarakat (Nugroho, 2000:77). Negara Indonesia yang notabene sebagai negara dunia ketiga, tidak lepas dari masalah anak jalanan. Banyak faktor yang menstimulasi munculnya fenomena anak jalanan, di antaranya adalah terpuruknya perekonomian bangsa akibat multi krisis sejak tahun 1997.

Alasan lainnya mengapa banyak sekali anak jalanan adalah karena faktor dicampakkan, saat ini tidak sedikit orang tua yang tega mencampakkan anak yang tidak diinginkannya, entah karena alasan kemiskinan, sudah terlalu banyak memiliki anak atau karena anak cacat. Dengan sengaja mereka mencampakkan anaknya ke jalanan untuk berjuang hidup sendiri. Pada umumnya mereka anak-anak yang hidup di jalanan, hanya bisa memperoleh penghasilan dari hasil mengemis, mengamen, asongan, menjadi tukang parkir, pemulung dan lain-lain. Tidak jarang anak jalanan mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari anak jalanan lain yang usianya jauh di atasnya. Saat ini terdapat 36,99% anak usia 3-6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan anak usia dini, 1,9% anak usia 7-12 tahun, 9,3% anak usia 13-15 tahun, dan 38,9% anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah, dan masih terdapat 24,1% anak yang belum memiliki akta kelahiran (Susenas 2013).

Pembagian anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Anak Jalanan Usia Balita adalah anak jalanan yang berusia 0-5 tahun.
2. Anak Jalanan Usia Sekolah adalah anak jalanan yang berusia 6-15 tahun.

3. Anak Jalanan Usia Produktif adalah anak jalanan yang berusia 14-18 tahun.

E. Kerangka pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan kerangka konsep disusun berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang relevan. Dalam kerangka dibawah ini, teori yang digunakan adalah teori Charles Jones yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoprasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas yakni a) organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, b) interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, c) aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan - kegiatan rutin yang meliputi barang dan jasa.



Gambar I : Bagan Kerangka Fikir

F. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari judul di atas, maka fokus penelitian ini berada di Dinas Sosial Anak Jalanan Kota Makassar karena hanya di Dinas Sosial penulis dapat mengambil data tentang proses pembinaan Anak Jalanan.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian adalah penjelasan dari konsep kerangka pikir. Adapun penelitian ini dalam pengelolaan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar adalah:

1. Implementasi, merupakan terlaksananya sebuah program di Dinas Sosial Kota Makassar.
2. Organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan mengenai kebijakan humanisasi anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Makassar.
3. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, oleh pemerintah Daerah Kota Makassar dalam hal ini oleh Dinas Sosial Kota Makassar.
4. Aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan - kegiatan rutin yang meliputi barang dan jasa. Aplikasi biasanya dilakukan untuk menjalankan perintah-perintah atau kegiatan-kegiatan yang ingin di capai dengan mudah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Dari bulan Mei sampai Juni 2016 setelah seminar proposal penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Makassar. Pusat Pelayanan Sosial anak Jalanan ini merupakan lembaga yang melaksanakan pembinaan anak jalanan, yang berfungsi sebagai Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Melihat kian merajalelanya anak jalanan khususnya di Kota Makassar, maka dengan pembinaan ini diharapkan para anak jalanan setelah keluar dari Pusat Pelayanan Sosial ini mereka mengalami perubahan sikap atau perilaku dan meninggalkan kehidupan yang lama dengan kembali menjalani pola hidup yang baru.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji obyek dan mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Dengan melihat unsur-unsur sebagai satuan objek kajian yang saling terkait selanjutnya mendeskripsikannya. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut.

Metode ini digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi tentang pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini studi kasus, yaitu merupakan bentuk penelitian yang meneliti fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas (*bounded context*), meskipun batas-batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas. Kasus tersebut dapat berupa individu, organisasi, karakteristik atau atribut dari individu-individu, peristiwa atau insiden tertentu, dan sebagainya. Studi kasus merupakan penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu.

C. Sumber Data

1. Data primer yakni data yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan maupun data yang diperoleh dari para pembina Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar.
2. Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta diperoleh dengan cara penelusuran arsip dan berbagai perpustakaan.

D. Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui

informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti, mengetahui dan terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian. Adapun Informan yang membantu memberikan data dan informasi yang tepat dan akurat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan
1	Dr.H Yunus Said M, Si	YS	Kepala Dinas Sosial Kota Makassar
2	Haidar Hamzah S.STP	HH	Pembina Anak Jalanan
3	Saprianto	SA	Pembina Anak Jalanan
4	Musfahuddin Munsyir S. Sos	MM	Pembina Anak Jalanan
5	Brusli	BI	Anak Jalanan
6	Kacong	KC	Anak Jalanan
7	Dede	DD	Anak Jalanan
8	Tobo	TB	Anak Jalanan
Total			8 orang

Sumber: Kota Makassar, Mei 2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pencapaian penyelenggaraan pembinaan Anak Jalanan, tentunya hasil observasi tersebut dapat dijadikan bahan acuan dalam mengelolah data.

Observasi pertama penulis yaitu ketika melihat semakin maraknya anak-anak yang berkeliaran dijalan kemudian muncul rasa ingin tahu penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan tentang anak jalanan. Pada tanggal 07 Mei 2016 penulis mengantar surat izin penelitian dari kantor Kesbang yang ditujukan ke Dinas Sosial Kota Makassar.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk dapat memperoleh suatu data berupa informasi dari Anak Jalanan yang mengikuti pembinaan keterampilan. Selanjutnya, peneliti dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut melalui pengolahan data secara komprehensif sehingga wawancara tersebut dapat memungkinkan peneliti untuk dapat mengetahui bagaimana pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar.

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan penulis, yaitu pada tanggal 12 Mei 2016 penulis bertemu dengan bapak Saprianto pas di pintu masuk kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Pada 17 Mei 2016 di depan kantor Dinas Sosial Kota Makassar penulis bertemu dengan bapak Dr. H. Yunus Said M,Si. Meskipun beliau sangat buru-buru kala itu namun penulis sempat melakukan wawancara. Selanjutnya pada senin pagi, tanggal 06 Juni 2016 penulis bertemu dengan bapak Haidar Hamsah S.STP diruangannya.

Kesokan harinya di depan pintu gerbang Dinas Sosial Kota Makassar penulis bertemu dengan informan Dede dan Tobo. Pada saat itu juga penulis bertemu dengan bapak Musfahuddin Mansyir S.Sos namun tidak melakukan wawancara dikarenakan jam sudah menunjukkan jam 12.00 (dua belas siang) artinya sudah jam istirahat Kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Wawancara dengan beliau penulis lakukan dua hari sesudahnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil dimana menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian. Adapun sasaran dokumentasi yaitu foto-foto Anak Jalanan yang memberi informasi, pembina Anak Jalanan dan lokasi dari mana peneliti mendapatkan informasi.

Dokumentasi yang digunakan penulis yaitu dokumentasi yang berupa beberapa ceprekan foto. Dokumentasi yang berupa foto ini memang tak banyak disebabkan penulis kesulitan mengambil gambar. Karena selain penulis melakukan penelitian sendiri juga beberapa informan tampak sibuk dengan urusannya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha pengumpulan data yang menjadi obyek peneliti, namun juga merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan pengumpulan data. Analisis data berawal dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil teknik pengumpulan data baik wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang. Data yang diperoleh dilapangan diolah dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Anak Jalanan Kota Makassar.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut sugiyono (2014:274) teknik pengumpulan data triangulasi diartikan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Ada tiga macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan cara wawancara; membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang

dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau yang berbeda-beda, maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga di temukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian. Dari tim yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di Kabupaten/Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung pandang Baru, Kecamatan Tallo Kota Makassar, berada pada tanah seluas 499m², dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat,
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru,
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat.

2. Visi dan Misi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar, Maka Visi dan Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya Pengendalian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

b. Misi

- 1) Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Upaya Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, dan Jaminan Sosial,
- 2) Mengembangkan Sistem Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Transparatif dan Akuntabel,
- 3) Meningkatkan Kapasitas para Stakeholder dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas, dan memuaskan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/stakeholders khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.

- 2) Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipasi sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- 3) Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- 4) Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta bimbingan organisasi sosial
- 5) Melakukan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pemberian pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.

3) Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.

c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, kegiatan dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan pelaksanaan penelitian/ pendataan PMKS dan PSKS.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial, dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan korban tindak kekerasan pekerja migran.

e. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat fakir miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar.

f. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap organisasi sosial/LSM dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan
- c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Seksi Pembinaan Keluarga dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

- 1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
- 2) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
- 3) Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan pemulung.

e. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

- 1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
- 2) Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial
- 3) Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial

f. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

- 1) Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
- 2) Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar
- 3) Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas ini sebagai unsur pelaksana operasional dinas pada Dinas Sosial Kota Makassar.

5. Bidang Kewenangan Dinas Sosial

- a. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah Kabupaten/Kota dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial,
- b. Penyuluhan dan bimbingan sosial,
- c. Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan,

- d. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti),
- e. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup Kabupaten/Kota,
- f. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti),
- g. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat,
- h. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis, dan eks narapidana),
- i. Pemberdayaan keluarga fakir miskin meliputi fakir miskin, komunitas adat terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi,
- j. Pemberdayaan karang taruna/organisasi kepemudaan,
- k. Pemberdayaan organisasi sosial/LSM lingkup Kabupaten/Kota,
- l. Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat,,
- m. Pemberdayaan dunia usaha (partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial),
- n. Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup Kabupaten/Kota,
- o. Penanggulangan korban bencana alam lingkup Kabupaten/Kota,
- p. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia),
- q. Penanggulangan korban napza,
- r. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga,

- s. Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja,
- t. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten/Kota,
- u. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota,
- v. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten/Kota,
- w. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

6. Adapun sasaran dari bidang Kewenangan tersebut adalah Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meliputi :

a. Anak Balita Terlantar

Permasalahan pokok yang berkaitan dengan anak balita terlantar antara lain kondisi gizi yang buruk, keterbatasan jangkauan pelayanan sosial bagi anak balita, disamping itu semakin terbatasnya waktu kedua orang tua untuk memberikan perhatian penuh bagi keberlangsungan tumbuh kembangnya anak dalam lingkungan keluarganya.

b. Anak terlantar

Pelayanan sosial yang diberikan kepada anak terlantar yaitu pemberdayaan anak terlantar melalui pemberian bantuan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama serta pemberian latihan keterampilan melalui panti sosial bina remaja.

c. Anak Nakal

Pelayanan sosial yang diberikan terhadap anak nakal yaitu melalui pembinaan dalam panti yang dilaksanakan di Panti Marsudi Putra Salodong.

d. Anak Jalanan

Pelayanan Sosial yang diberikan kepada anak jalanan berupa pemberian beasiswa bagi anak jalanan usia sekolah, pemberian latihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak jalanan serta pemberdayaan keluarga anak jalanan.

e. Penjaja seks Komersial (PSK)

Penanganan terhadap PSK yang terjaring melalui razia diberikan pembinaan melalui panti dan non panti. Pembinaan dalam panti berupa pemberian latihan keterampilan yang dilaksanakan di Panti Sosial karya wanita mattiro deceng. Sedangkan pembinaan luar panti melalui kegiatan pemberdayaan berupa pemberian latihan keterampilan.

f. Gelandangan Pengemis

Penanganan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap gepeng serta pemberdayaan gepeng beserta keluarganya melalui pemberian bantuan modal usaha.

g. Eks korban penyalahgunaan napza

Sesorang yang pernah menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

h. Anak, wanita dan lanjut usia korban tindak kekerasan

Anak berusia 5-18 tahun, wanita yang berusia 18-59 tahun dan lanjut usia yang berusia 60 tahun keatas yang terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah satu atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.

i. Penyandang cacat

Pelayanan sosial yang diberikan bagi penyandang cacat adalah pemberian bantuan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat berat melalui Departemen Sosial RI.

j. Eks Kusta

Eks kusta adalah seseorang yang pernah menderita penyakit kusta dan telah dinyatakan sembuh secara medis, tetapi mengalami hambatan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari karena dikucilkan keluarga atau masyarakat. Penanganan yang diberikan bagi eks kusta adalah pembedayaan keluarga eks kusta.

k. Eks Narapidana

Eks narapidana adalah seseorang yang telah selesai masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan

mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan kehidupannya secara normal.

l. Lanjut Usia terlantar

Penanganan terhadap lanjut usia terlantar yang masih produktif yaitu pemberdayaan lanjut usia melalui pemberian bantuan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama. Selain itu ada juga pemberian bantuan pelayanan dan jaminan sosial lanjut usia terlantar yang berasal dari Departemen Sosial RI.

m. Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Wanita rawan sosial ekonomi adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

n. Keluarga Fakir Miskin

Pelayanan sosial yang diberikan bagi keluarga fakir miskin yaitu pengembangan potensi keluarga fakir miskin, pemberian latihan keterampilan berusaha bagi keluarga fakir miskin, pendampingan UEP dan KUBE fakir miskin.

o. Keluarga berumah tidak layak huni

Pelayanan sosial yang diberikan adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni berupa pemberian bantuan bahan bangunan rumah seperti seng, balok kayu, tripleks, dan papan.

p. Perintis Kemerdekaan

Perintis kemerdekaan adalah orang-orang yang telah berjuang mengantarkan Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang diakui dan disahkan melalui kepmensos RI No.15/HUK/1996 sebagai perintis kemerdekaan. Di Kota Makassar Perintis Kemerdekaan ada 6 Orang.

q. Keluarga Pahlawan Nasional

Keluarga pahlawan nasional adalah suami atau isteri dan anak dari seorang pahlawan nasional yang ada di Kota Makassar berjumlah 3 orang.

r. Keluarga Veteran

Keluarga Veteran adalah suami atau isteri dan anak dari seorang yang telah menjadi anggota veteran berdasarkan surat keputusan dari Menteri pertahanan dan keamanan RI. Jumlah keluarga veteran yang ada di kota Makassar yaitu 115 orang.

s. Korban bencana alam

Bantuan yang diberikan bagi korban bencana alam berupa dapur umum, apabila korban lebih dari 10 KK atau 75 jiwa dengan waktu 3 (tiga) hari atau bisa ditambah 2 (dua) hari menjadi 5 (lima) hari apabila keadaan betul-betul darurat, selain itu ada bantuan permakanan dan tenda.

t. Keluarga bermasalah sosial psikologis

Keluarga bermasalah sosial psikologis yang tercatat pada Dinas Sosial yaitu 19 KK.

u. Masyarakat yang tinggal di Daerah Rawan Bencana

Wilayah yang paling rawan bencana di Kota Makassar yaitu kecamatan ujung tanah, karena selain berpendudukan padat juga berlokasi di pesisir pantai.

v. Korban Tindak Kekerasan

Keluarga maupun kelompok yang mengalami tindak kekerasan baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, pemaksaan, diskriminasi, dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berbeda dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga mengakibatkan penderitaan atau fungsi sosialnya terganggu.

w. Pekerja Migran

Seseorang yang bekerja diluar tempat asalnya menetap sementara ditempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar. Pelayanan sosial yang diberikan yaitu pemberdayaan bagi pekerja migran.

B. Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan serta apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar. Adapun yang menjadi indikator adalah 1) Interpretasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program

berjalan, 2) organisasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan 3) aplikasi, (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan - kegiatan rutin yang meliputi barang dan jasa. Berikut penjelasan secara detail beberapa indikator :

1. Organisasi

Organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian (orang dsb) sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Organisasi adalah bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing (gaji, kepuasan kerja, dll) yang bekerjasama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama (tujuan organisasi). Agar tujuan organisasi dan tujuan individu dapat tercapai secara selaras dan harmonis maka diperlukan kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak (pengurus organisasi dan anggota organisasi) untuk bersama-sama berusaha saling memenuhi kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab, sehingga pada saat masing-masing mendapatkan haknya dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi anggota organisasi/pegawai maupun bagi pengurus organisasi atau pejabat yang berwenang.

Menurut Stoner organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan orang-orang dibawah pengawasan menejer (pimpinan) untuk mengejar tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester I Bernard organisasi itu terbagi atas organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar, serta dengan hubungan kerja yang rasional

seperti, perseroan terbatas, sekolah, negara, dan lain-lain sebagainya. Organisasi informal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari . Seperti, arisan ibu-ibu sekampung, belajar bersama anak-anak SD, dan lain-lain.

Organisasi bisa dibentuk apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Manusia : sebuah organisasi akan terbentuk jika terdapat unsur manusia yang saling bekerjasama, ada pemimpin dan juga yang dipimpin telah terpenuhi.
2. Sasaran atau tujuan: sebuah organisasi akan terbentuk jika mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai
3. Pekerjaan : sebuah organisasi akan terbentuk jika mempunyai pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian kerja.
4. Teknologi : sebuah organisasi akan terbentuk jika terdapat unsur-unsur teknisnya.
5. Tempat kedudukan : sebuah organisasi akan terbentuk jika ada tempat kedudukannya.
6. Struktur: sebuah organisasi akan terbentuk terdapat hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, sehingga terciptalah organisasi
7. Lingkungan : sebuah organisasi akan terbentuk jika lingkungannya sangat mendukung dan saling mempengaruhi, seperti misalnya adanya sistem kerjasama sosial.

Secara sederhana organisasi memiliki tiga unsur pokok yakni orang, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama. Tiga unsur organisasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling kait atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bapak YS selaku kepala Dinas Sosial Kota Makassar

“sasaran kami itu disini adalah menyangkut semua manusia yang ada dijalan, mulai anak-anak sampai orang yang tua sekali. kami melakukan pembinaan tujuannya yaitu agar gelandangan, anak-anak, pengamen, dan semua yang saya sebut tadi tidak hidup dijalan lagi atau tidak berkeliaranlah, karena mereka pantas mendapat penghidupan yang layak sama seperti kita ini. Cara mengumpulkan mereka itu dengan cara razia setiap hari yang dilakukan oleh satpol. Mereka juga berhak hidup selaknya dan mereka berhak mendapatkan hak dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini menyediakan mobil khusus satpol setiap harinya untuk kasi' kumpul itu anak-anak dijalan”(wawancara, 17 Mei 2016)

Menurut kepala Dinas Sosial Kota Makassar sebagai salah satu informan, mengatakan bahwa anak jalanan pantas mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana mestinya. Dan sasaran utama atau tugas pokok Dinas Sosial Kota Makassar adalah menanggulangi perkembangan anak-anak jalanan.

Sedangkan petikan wawancara dengan informan MM selaku kepala satpol Dinas Sosial Kota Makassar

“semua manusia-manusia yang tinggal di jalan, itu sasaran kami. Mereka kami ambil lalu dimasukkan di mobil dan kemudian dibawah kesini (kantor dinas).Mereka kan semua dipelihara oleh negara. Kebanyakan mereka yang kami dapat itu anak-anak yang berusia min. 8 (delapan) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun. Selanjutnya anak-anak ini dibawah, diberi penceramahan di sini

(kantor dinas) kemudian kita tunggu sampai jaminannya datang. Kalau orang tuanya tidak datang maka kita bawa ke panti asuhan” (wawancara, 09 Juni 2016)

Penuturan salah satu informan berpendapat yang sama, bahwa sasaran utama Dinas Sosial Kota Makassar adalah gelandangan, pengemis dan lain-lain yang dikumpulkan lewat razia setiap harinya.

Petikan wawancara dengan informan DD, anak jalanan yang telah di razia,

“saya bersama teman tadi di ambil sama bapak-bapak itu di depan ruko orang lalu saya dibawa kesini naik mobil” (wawancara, 22 Juni 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan kepala Dinas Sosial dan kepala satpol PP kantor Dinas Sosial Kota Makassar serta salah satu anak-anak yang telah dirazia menunjukkan bahwa fungsi organisasi di kantor dinas sosial sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini kantor Dinas Sosial telah membuktikan bahwa langkah yang terlebih dahulu yaitu menentukan sasaran dan sasarannya yaitu anak-anak sampai orang tua yang hidupnya bergelantungan dijalan. Selanjutnya unit-unit yang bertugas merazia yaitu satpol Dinas Sosial Kota Makassar.

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan dan melakukan wawancara kepada beberapa informan hal ini menunjukkan bahwa teori Charles Jones sudah sejalan yang terapkan di kantor Dinas Sosial yaitu organisasi, merupakan pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan seni yang menggambarkan komunikasi secara tidak langsung, namun komunikasi tersebut dapat dengan mudah untuk dipahami. Interpretasi erat kaitannya dengan jangkauan yang harus dicapai oleh subjek dan sekaligus pada saat yang bersamaan diungkapkan kembali sebagai suatu struktur identitas yang terdapat didalam kehidupan, sejarah, dan objektivitas. Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa.

Istilah interpretasi mungkin tidak terlalu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini sering muncul diartikel atau berita di koran seperti interpretasi data, interpretasi karya seni, interpretasi sejarah, dan lain sebagai. Pengertian interpretasi adalah tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, pendapat, atau pandangan teritis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi. Pengertian interpretasi dalam sejarah adalah suatu bentuk penafsiran sejarawan atas fakta sejarah yang menjadi suatu kesatuan alur cerita harmonis dan masuk akal. Penafsiran sejarah sifatnya subyektif yang berarti bahwa sangat bergantung kepada sipenafsirserah itu. Perbedaan interpretasi pada sejarawan pada umumnya terjadi karena adanya perbedaan latar belakang, pola pikir, pengaruh, dan motivasi. Pengertian interpretasi dalam hukum adalah menentukan makna atau arti-arti dari suatu teks atau

bunyi pasal serta hal-hal yang terkait dengannya. Pengertian interpretasi peta adalah aktivitas membaca peta dengan memberikan suatu penafsiran atau memaknai isi peta dengan menggunakan simbol-simbol yang ada. Simbol-simbol yang ada di peta. Contoh, objek geografi seperti gunung, danau, sungai, jalan, laut, jalan kereta api dan lain-lain. Interpretasi biasanya dilakukan untuk mendapatkan pengertian atau pengetahuan yang lebih jelas dan mendalam tentang sesuatu. Misalnya, sebuah lukisan abstrak yang kurang dipahami maksudnya bagi sebagian besar orang. Lukisan ini dapat menjadi objek interpretasi sehingga orang awam dapat mengetahui makna yang terkandung pada lukisan tersebut.

Petikan wawancara dengan informan YS selaku kepala Dinas Sosial Kota Makassar, memaparkan bahwa,

“langkah-langkah yang lakukan saat ini sudah direncanakan dengan baik. Baik itu program yang dilakukan di dalam maupun yang dilakukan diluar. Dan alhamdulillah, semua sudah berjalan dengan baik meskipun ada kendala-kendalanya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menentukan program pembinaan yaitu melihat terlebih dahulu baik atau manfaatnya baik anak-anak yang akan nanti dibina. Jangan asal langsung buat program. Kalau berbicara tentang dukungan, tentu banyak orang yang mendukung, lihat saja di sekeliling kita banyak LSM yang mendirikan rumah singgah untuk anak-anak kurang mampu atau semacamnya,” (wawancara, 17 Mei 2016)

Dari petikan wawancara di atas dengan salah satu informan berpendapat bahwa dalam menangani anak jalanan langkah yang dilakukan sudah terprogram dengan baik . Program tersebut diambil jika manfaat yang didapat anak jalanan lebih besar disbanding dengan sebaliknya. Jawaban yang

lain juga yang di paparkan oleh SA selaku salah satu informan, mengatakan bahwa,

“semua yang dilakukan, program atau pembinaan yang dijalankan di sini itu semua sudah direncanakan sama orang diatas. Saya dan yang lain sisa melakukan tugas. Langkah-langkah yang diambil itu harus mempertimbangkan baik buruknya kedepannya. Apakah itu bisa diterima dengan baik sama anaknya atau malah sebaliknya. Karena kita disini hanya sekedar membina. Tidak lebih tidak kurang. Persoalan yang lainnya kita kembalikan lagi ke anaknya dan orang tua anak itu. Dukungan dari luar tentu sangat bagus karna permasalahan anak jalanan inikan dari dulu tidak pernah kelar. (wawancara, 12 Mei 2016)

Menurut informan SA mengatakan bahwa program yang dilakukan sudah dipertimbangkan baik atau buruknya untuk anak jalanan ke depannya nanti. Informan juga berpendapat bahwa dukungan dari luar sangatlah bagus karena menurut informan permasalahan anak jalanan ini tidak pernah kelar dari dulu sampai sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan selaku kepala Dinas Sosial Kota Makassar dan salah satu pembina anak jalanan Dinas Sosial Kota Makassar Kota Makassar membuktikan bahwa interpretasinya sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini di buktikan dengan adanya perencanaan yang tepat dalam mengambil dan menentukan program yang akan dijalankan dalam proses pembinaan anak jalanan kedepannya.

Setelah peneliti melakukan obsevasi di lapangan dan melakukan wawancara kepada beberapa informan hal ini menunjukkan bahwa teori Charles Jones sudah sesuai yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Makassar

yaitu interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

3. Aplikasi

Aplikasi berasal dari kata *application* yang artinya penerapan, lamaran, penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju. Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Menurut Yuhefizar aplikasi adalah program yang sengaja dibuat dan dikembangkan sebagai pemenuh kebutuhan penggunaannya dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut Hengky W. Permana aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai aktivitas ataupun pekerjaan, seperti aktivitas perniagaan, periklanan, pelayanan masyarakat, game dan berbagai aktivitas lainnya yang dilakukan oleh manusia.

Berikut hasil wawancara dengan informan HH selaku salah satu pembina anak jalanan Dinas Sosial Kota Makassar

“program-program kami itu disini yaitu merazia anjalnya dulu. Pelaksanaannya yaitu setiap hari kami turun kejalan kecuali tanggal merah yah, karena kita juga mau libur donk. Sebenarnya manfaat yang didapat anjal itu banyak, contohnya, setelah dirazia mereka kita

bawa ke panti asuhan atau kita kasi kembali ke keluarganya. Mereka sudah tidak panas-panasan di jalan lagi. Kan tidak enak tinggal di jalan”(wawancara. 06 Juni 2016)

Dari petikan wawancara dengan salah seorang informan berpendapat bahwa pihak dari Dinas Sosial setiap hari turun kejalan untuk merazia anak dijalan. Informan juga beranggapan bahwa manfaat bagi anak jalanan sangatlah bagus karena setelah dirazia para anak jalanan dibawa ke panti asuhan atau dikembalikan ke orang tua atau keluarga terdekatnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh SA selaku pembina anak jalanan Dinas Sosial Kota Makassar,

“ya, salah satu program yang setiap hari kita aplikasikan yaitu merazia anjal setia harinya. Program yang lain juga yakni kita bawa dipanti asuhan. Disana mereka di didik dan diberikan penghidupan yang layak. Berbicara tentang manfaat, kalau bagi saya banyak manfaatnya seperti, diberikan santunan, di bawa kembali keorang tuanya. Cuman kalau bagi Anak-anak yang terbiasa dari jalan, mungkin nda ada manfaatnya bagi mereka karena pohon uang mereka ada di jalan” (wawancara. 26 Mei 2016)

Hal serupa juga dituturkan oleh salah satu informan yang beranggapan bahwa setiap hari pihak Dinas Sosial melakukan razia di sepanjang kota Makassar. Menurut informan SA setelah anak jalanan di razia pihaknya kemudian membawa anak tersebut ke panti asuhan atau mengembalikan ke orang tua anak tersebut.

Tambahan hal yang sama di ungkapkan dari informan YS selaku kepala Dinas Sosial Kota Makassar

“yang rutin dilakukan yaitu program razia setiap harinya. Dan sudah diimplementasikan sudah cukup lama dan berjalan

dengan lancar menurut saya. Tapi yang saya heran, anak-anak jalanan ini kok tidak bisa habis yah ?” (wawancara. 17 Mei 2016)

Menurut beberapa informan diatas selaku anggota Satpol PP Dinas Sosial Kota Makassar dan pembina anak jalanan Dinas Sosial Kota serta tambahan dari kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Pelaksanaan aplikasi sudah terarah dengan baik. Semua program yang sudah direncanakan terimplementasi dengan rutinnya dan dilakukan oleh orang-orang yang sudah seharusnya bertugas.

Setelah peneliti sudah melakukan observasi dilapangan, menunjukkan bahwa teori yang dipaparkan oleh Charles Jones sudah benar dan diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kota Makassar, yaitu aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan - kegiatan rutin yang meliputi barang dan jasa.

C.Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar

1. Rumah Singgah

Faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan yang paling utama yaitu adanya *political will* dari pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar sebagai kota yang bebas dari anak jalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, merupakan faktor yang sangat mendukung implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. Selain itu dukungan masyarakat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial memandang bahwa aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) memandang bahwa penanganan anak jalanan harus dilakukan dengan melibatkan institusi sekolah, rumah singgah, dan pemberdayaan keluarga dengan memberikan modal usaha keluarga.

Dengan demikian disadari bahwa berbagai pihak perlu terlibat baik untuk anak itu sendiri maupun untuk keluarganya. Terdapat beberapa yayasan pendidikan yang berkenan untuk memberikan layanan bagi anak jalanan untuk mengikuti pendidikan di sekolahnya. Demikian juga terdapat pihak yang berkenan membantu memberdayakan keluarga anak jalanan. Salah satunya Dinas Sosial menyediakan dana melalui APBD meskipun jumlahnya relatif terbatas

Hasil wawancara dengan informan YS selaku kepala Dinas Sosial Kota Makassar

“anak-anak yang sudah dirazia dibawa ke panti asuhan, rumah singgah, dan yang paling penting pertama kita cari keluarganya ini anak-anak. Nanti kalau tidak ketemu kita bawa ke yang saya sebut tadi, (panti asuhan ataupun rumah singgah). Kerena terus terang kendala yang paling utama yang kita hadapi disini adalah tidak ada tempat penampungan anak-anak untuk dibina, beda seperti di sudiang yang masalah perempuan-perempuan itu. Disana itu luas lokasi pembinaannya. Di sini kita sangat terbatas” (wawancara. 17 Mei 2016)

Dari wawancara dengan informan di atas mengatakan bahwa anak-anak yang sudah terjaring razia itu di bawa ke panti asuhan atau di bawa ke rumah singgah. Namun pada dasarnya hal pertama yang dilakukan setelah di razia adalah mencari orangtua dari anak tersebut. jika orang tuanya ada, maka anak yang sudah di razia di kembalikan pada orang tuanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh MM, selaku kepala satpol Dinas Sosial Kota Makassar,

“satu ji itu kendalanya disini, tidak ada tempat penampungannya anak-anak yang sudah dirazia. Kita hanya sekedar memberikan pencerahan atau sepatah kata motivasi pada mereka, setelah itu kita kembalikan ke keluarga masing-masing”(wawancara, 09 Juni 2016)

Menurut wawancara dengan informan MM selaku salah satu informan berpendapat bahwa kendala yang di hadapi Dinas Sosial dalam membina anak jalanan adalah kurangnya tempat penampungan untuk menampung para anak yang sudah di razia. Pihak Dinas Sosial hanya sekedar memberikan pencerahan lalu kemudian anak yang sudah di razia di kembalikan ke orang tuanya.

Tambahan dari informan HH selaku salah satu pembina anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar,

“iya, seharusnya disini ada tempat pembinaannya anak-anak yang sudah dirazia agar mereka tidak turun lagi ke jalan. Karena kenapa, banyak di antara mereka yang sudah dirazia kembali lagi turun kejalan. Orang tua mereka tidak melarang, sumber penghasilannya ada dijalan. Tidak mungkin orang tua mereka melarang. Untung ea kalau orang tuanya juga tidak sama kerjanya anaknya. Sama-sama dijalan. Kan yang banyak begitu” (wawancara, 06 Juni 2016)

Sebagai informan, HH juga beranggapan bahwa, kurangnya tempat penampungan bagi anak yang di razia merupakan factor utama yang mempengaruhi banyaknya anak jalanan yang kembali turun ke jalan bahkan sudah di razia. Itu di pengaruhi karena sumber penghasilan mereka ada di jalan.

Menurut beberapa informan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan yang berasal dari lingkungan kantor Dinas Sosial Kota

Makassar itu sendiri yaitu dipengaruhi oleh penyediaan tempat (ruangan). Tidak adanya penyediaan tempat dari pihak pemerintah untuk proses pembinaan anak-anak jalanan. Dinas Sosial hanya mengembalikan anak-anak jalanan ini ke orang tua.

Kurangnya Rumah singgah untuk menampung para anak-anak yang terlantar merupakan faktor yang sangatlah penting dalam mengentaskan permasalahan anak di Kota Makassar. Disaat inilah pemerintah seharusnya dibutuhkan kinerja untuk mampu membuat sarana penunjang masa depan anak bangsa sebagai calon penerus bangsa.

2. Keluarga (orang tua)

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Namun ketika tugas orang tua terhadap anak dipertanyakan, maka pergaulan anak pun juga akan dipertanyakan pula. Dari anak rumah-rumahan akan menjadi anak tak teurus di jalanan.

Kurangnya koordinasi antara instansi terkait yang seharusnya menangani anak jalanan, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghilangkan budaya *charity* dalam menanggulangi anak jalanan merupakan faktor dari luar yang bisa menghambat proses implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. Selain itu, dirasakan bahwa belum

didapatkan model dan pendekatan yang tepat dan efektif, sehingga terkesan penanganan anak jalanan masih bersifat *charitatif* saja. Arah pengentasan berbais hak hidup, hak tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan dan hak berpartisipasi belum tampak. Demikian juga, gagasan untuk menetapkan Kota Makassar sebagai Kota Layak Anak masih dalam wacana.

Petikan wawancara dengan informan dengan TB salah satu anak jalanan,

“iye’ kak, saya sudah pernah dibawah ke kantor beberapa bulan lalu, saya di ambil sama mamaku. Iye’ dimarahi sama mamaku karena saya di tangkap. Besoknya saya turun kejalan lagi. Nda dilarang (turun di jalan lagi). (wawancara, 07 juni 2016).

Dari wawancara dengan salah satu anak jalanan sebagai informan mengatakan bahwa orang tua dari anak ini setuju jika anaknya mendapat penghasilan dari jalan. Namun sebaliknya orang tua tersebut marah jika anaknya di tangkap oleh pihak satpol dari Dinas Sosial.

Jawaban yang hampir sama juga di lontarka salah satu anak jalanan KC sebagai salah satu informan,

“iye’ mamaku yang suruh kerja begini. Uang makan dirumah susah kak, iye’ nda sekolah. Maunya sih sekolah juga tapi tidak punya ongkos ka” (wawancara, 07 Juni 2016).

Alasan yang sama disampaikan juga oleh seorang anak jalanan sebagai salah seorang informan, beranggapan bahwa pihak orang tua tidak pernah melarang anaknya untuk mencari uang (nafkah) di jalan. Dan sebaliknya orang tuanya marah jika anaknya tertangkap razia yang dilakukan oleh satpol.

Penuturan dengan alasan yang sama juga di berikan dari informan BI sebagai salah satu anak jalanan,

“tidak dilarang ji, kan uangnya saya kasi’ ke mamaku kalau ada saya dapat. Lumayan kak penghasilannya. Naik pete-pete biasanya. Area alauddin sampai talasapang saya. Nda mau ja sekolah kak” (wawancara, 22 Juni 2016)

Tambahan hal serupa juga ditambahkan oleh seorang anak jalanan mengatakan bahwa, uang yang di dapat dari jalan itu diberikan ke orang tuanya. Yang berarti pihak dari orang tua tidak pernah melarang anaknya turun ke jalan. Sama halnya dengan anak jalanan yang lain, orang tua hanya marah jika anaknya tertangkap razia oleh satpol.

Dari semua jawaban informan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa faktor paling penting yang mempengaruhi proses implementasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar adalah dari pihak keluarga dan dari anak jalannya itu sendiri. Kurangnya perhatian dari orang tua yang seharusnya memberikan nafkah serta kurangnya pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama anak saat menginjak usia pertumbuhannya. Orang tua yang seharusnya melindungi anaknya kini sudah hampir terbalik pihak anak yang harus melindungi orang tuanya.

Pihak pemerintah yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia merupakan penyebab pendukung kedua maraknya anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang fakir miskin serta anak jalanan yang dipelihara oleh negara hanyalah sekedar bukti diatas hitam yang sampai sekarang hanya menjadi wacana saja.

Kota Makassar yang bebas dari anak jalanan hanyalah sekedar impian yang entah kapan akan terwujud. Target pemerintah yang bebas anak jalanan mungkin hanya mimpi belaka.

Minimnya instansi-instansi yang berperan menangani anak jalanan menambah faktor yang mempengaruhi pengentasan anak jalanan di Kota-kota besar di Indonesia tak terkecuali Kota Daeng, Kota Makassar.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab IV yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar dari segi organisasi, dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar sebagai salah satu organisasi instansi pemerintah yang bertugas mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik.
2. Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar, dari segi interpretasi dapat dikatakan masih perlu dibenahi lagi agar anak jalanan yang sudah dirazia tidak kembali lagi kejalan.
3. Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar, dari segi aplikasi sudah bisa tergolong baik. Hanya saja masih perlu ditingkatkan lagi.
4. Kendala-kendala yang dihadapi dari pihak Dinas Sosial Kota Makassar yaitu kurangnya tempat atau lokasi yang bisa menampung anak jalanan untuk melakukan pembinaan. Namun pihak Dinas Sosial Kota Makassar bersama satpol PP Kota Makassar bekerja keras untuk mengentaskan masalah anak jalanan di kota Makassar.

B. Saran-saran

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan sebagai berikut :

1. Bagi pihak Dinas Sosial Kota Makassar agar kiranya lebih memperbaiki kinerjanya dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, khususnya program dalam rangka mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Makassar.
2. Bagi pihak pembina agar lebih memperhatikan kebutuhan anak-anak jalanan, standar pelayanan, serta fasilitas yang memadai.
3. Bagi anak jalanan yang sudah menerima pembinaan agar kiranya tidak kembali lagi ke jalan.
4. Bagi pihak orang tua anak jalanan setidaknya memberikan nafkah ke anak-anaknya. Jangan sebaliknya, orang tua mendukung si-anak untuk turun kejalan mencari nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah. sejarah, konsep dan penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Edi Suharto, Ph.D. 2011. *Kebijakan Sosial, Sebagai kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Fatonah. 2017. *Tahun 2017 Indonesia Bebas Anak Jalanan*.
- Nuryanti. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik*. Membumi Publishing.
- Syafie, Inu Kencana. 1999: *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*
- Solichin Abdul Wahab. MA. 2008. *Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara..
- Widjaja . H.A.W..1998: *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S.2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta: Lukman Offset. 2003.
- Soenarko, H.2003: *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University.
- Sugiyono.
- Pramascita. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan respond*.
<http.com.wordpress>. Diakses pada 06 januari 2016
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002.*Tentang Perlindungan Anak*. 2006. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 2 Tahun 2008 *Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota*

Departemen Sosial Republik Indonesia. 2004. *Standard Pelayanan Anak Jalanan melalui Rumah Singgah*. Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia



LAMPIRAN





RIWAYAT HIDUP



BESSE ERNIANTI. Lahir di Labaje Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.. Anak kedua dari empat bersaudara ayah dari Baso Mappasessu dan ibu Besse Tenri Angke. Menempuh

168 Rumpia pada tahun 1999 dan tamat pada tahun 2005. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Majauleng dan dinyatakan lulus pada tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Majauleng dan berhasil Lulus pada tahun 2011. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2011 mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara .

Berkat Rahmat Ilahi Rabbi dan doa yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul “implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar”.